DISIPLIN PEGAWAI PPPK

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) BD KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NO 7

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NO 7 TAHUN 2025 PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan aparatur sipil negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif
 - Untuk menjamin asas akuntabilitas dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya
 - Dalam peraturan ini, diatur mengenai kewajiban dan larangan bagi pegawai, jenis pelanggaran, serta sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan. Sanksi disiplin dibagi menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat, dengan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan yang jelas. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai upaya administratif bagi pegawai yang tidak puas dengan keputusan yang diambil.
 - Dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 ,UU Nomor 2 Tahun 2022, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 49 Tahun 2018, PP Nomor 49 Tahun 2018, PP Nomor 94 Tahun 2021, PP Nomor 79 Tahun 2021, Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022
- CATATAN :
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 Maret 2025
 - Lampiran 19 Halaman